



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH PARAMITA DAMAYANTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
3. NHK : 839973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/84 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 1.640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/30 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/30 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 255.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/30 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **306.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, DAIHATZU TAFT Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



4. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
5. MOTOR, HONDA GLP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
6. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.462.500.000
III. HUTANG	Rp.	469.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.993.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.